

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN RELEVAN, DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Teori Peran

Teori Peran (*role theory*) merupakan perpaduan antara beberapa disiplin ilmu yang meliputi psikologi, sosiologi, dan antropologi. Melalui ketiga disiplin ilmu tersebut, istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam dunia teater, seorang aktor harus dapat memainkan sebuah peran seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya tersebut diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan karakter tokoh terkait (Sarwono, 2009: 15).

Peran juga dapat diartikan sebagai sebuah karakterisasi yang digunakan untuk dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah drama. Karakter tersebut merupakan suatu batasan bagi seseorang untuk dapat melakukan apa yang seharusnya dilakukan agar tidak berbenturan dengan karakter yang lain. Demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konteks sosial, peran memiliki arti sebagai suatu batasan dari fungsi yang dibawa oleh seseorang ketika menduduki posisi dalam struktur sosial (Suhardono, 1994: 10).

Soekanto (2006: 243) menyatakan bahwa Peran adalah aspek yang berkesinambungan dalam kedudukan. Apabila seseorang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seorang tersebut sudah menjalankan suatu peranan tertentu. Perbedaan antara peran dan kedudukan dalam hal ini hanya untuk keperluan ilmu pengetahuan saja.

Pada dasarnya antara peran dan kedudukan tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Artinya tidak akan ada peran yang dapat dilakukan tanpa adanya suatu kedudukan, atau sebaliknya kedudukan tanpa peran. keterkaitan antara peran dan kedudukan membuktikan bahwa peran menentukan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat serta apa yang harus dilakukan untuk masyarakat. Pentingnya peran dalam suatu masyarakat

*commit to user*

adalah untuk mengatur perilaku seseorang. Peran menyebabkan adanya batas-batas tertentu yang dapat digunakan untuk memprediksi perbuatan-perbuatan seseorang dalam suatu kelompok masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan-hubungan sosial yang ada dalam suatu masyarakat merupakan hubungan antar peran-peran individu yang diatur oleh norma sosial. Misalnya, norma kesopanan yang menghendaki tata krama dalam suatu masyarakat (Soekanto, 2006: 244).

Abdulsyani (2015: 94) menyatakan bahwa peran dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan berbagai harapan yang terencana oleh seseorang yang mempunyai status sosial dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa, peran merupakan sikap dan tindakan seseorang yang disesuaikan dengan status kedudukannya didalam masyarakat.

Ciri pokok yang berhubungan dengan istilah peran dalam konteks ini terletak pada adanya interaksi sosial masyarakat yang berkaitan dengan norma yang berlaku didalamnya, termasuk pengakuan terhadap status sosialnya. Fasilitas utama bagi seseorang yang akan menjalankan peranannya adalah adanya lembaga sosial didalam masyarakat. Dalam lembaga sosial tersebut biasanya telah menyediakan kesempatan untuk melaksanakan suatu peran (Abdulsyani, 2015: 94).

Menurut Levinson dalam Polak (2000: 94) peran itu sendiri mencakup tiga hal yaitu: Pertama, peran merupakan norma-norma yang dihubungkan dengan kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, peran memiliki arti sebuah aturan yang menuntun seseorang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Kedua, peran merupakan sebuah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi. Ketiga, peran dapat dikatakan sebagai perikelakuan bagi seseorang yang memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial masyarakat.

Menurut Khantz dan Kahn yang dikutip dalam Soekanto (2001: 267) menyatakan bahwa teori peran menekankan pada sikap individu sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisinya di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, teori peran mencoba untuk

menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi dan berfokus pada peran yang mereka lakukan.

Dapat disimpulkan bahwa, teori peran merupakan perpaduan antara kedudukan dan peran yang memuat seperangkat hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban tersebut digunakan untuk mengontrol tindakan seorang pelaku peran. Teori peran juga mencakup tentang bagaimana sikap dan karakteristik individu ketika menduduki suatu jabatan dalam struktur sosial masyarakat. Selain itu, teori peran berkaitan langsung dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat, sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan sesuai dengan apa yang di harapkan.

Peran sosial yang ada di dalam masyarakat dapat diklarifikasikan berdasarkan macam-macamnya sesuai dengan sudut pandang yang ada. Menurut Hendropuspito dalam buku Narwoko (2004: 140) menyebutkan terdapat dua macam peran yang berdasarkan pelaksanaannya, yaitu :

- a. Peran yang diharapkan (*expected roles*) merupakan pelaksanaan peran yang berdasar pada penilaian masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menghendaki peran yang diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Peran yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana semestinya peran tersebut dijalankan. Pelaksanaan peran ini lebih fleksibel, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada didalam masyarakat (Narwoko, 2004: 140).

Berdasarkan jenis peran diatas, untuk memperoleh peran itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Peran pilihan (*achives roles*) merupakan peran yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri dan disertai usaha dalam memperoleh peran tersebut. Misalnya, seorang yang memutuskan untuk menjadi seorang kepala desa.
- b. Peran bawaan (*ascribed roles*) yaitu peran yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. Misalnya, peran sebagai seorang ibu, ayah, anak, dan lain sebagainya (Soekanto, 2010: 210).

Levi. Jr (1952 : 173) menyatakan bahwa macam-macam peran yang melekat pada individu tersebut berpengaruh terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat, maka hendaknya peran harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
- b. Peran tersebut diberikan pada seorang yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, untuk itu dibutuhkan adanya individu yang terlatih dan memiliki kesiapan untuk melaksanakannya.
- c. Jika semua orang dianggap mampu dan sanggup untuk melaksanakan perannya, maka belum tentu masyarakat memberikan peluang bagi individu yang ingin memiliki kedudukan.
- d. Didalam masyarakat dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan perannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena dalam pelaksanaannya terlalu banyak mengorbankan kepentingan pribadi.

Dalam interaksi sosial, melaksanakan peran merupakan hal terpenting. Namun dalam prosesnya sering ditemukan anggapan bahwa kedudukan lebih diutamakan daripada melaksanakan perannya. Sehingga banyak terjadi ketimpangan sosial akibat tidak sesuai dengan harapan. Hubungan-hubungan sosial yang terjadi tersebut dapat dipastikan bahwa dalam pelaksanaannya, pelaku sosial lebih mengutamakan haknya daripada kewajiban yang harus dilakukan (Levi, 1952: 173).

## 2. Lembaga Sosial

Istilah lembaga berasal dari kata *institution* yang merujuk pada pengertian tentang sesuatu yang sudah mapan (*established*). Menurut Anwar (2013: 198) secara sosiologi lembaga dapat diartikan suatu hal yang sudah stabil, terstruktur, dan mapan. Dalam pengertian ini, lembaga dapat dikatakan sebagai suatu sarana hidup yang didalamnya terdapat peran untuk menjalankan suatu fungsi sosial dalam masyarakat. Sedangkan lembaga sosial merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social institution* yang menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian lembaga sosial disini lebih menunjuk pada suatu bentuk yang didalamnya terdapat norma dan peraturan-peraturan

tertentu, dimana norma dan peraturan tersebut merupakan ciri dari lembaga itu sendiri (Soekanto, 1982: 217).

Menurut Alvin L. Bertrand yang dikutip dalam Wulansari (2009: 92) berpendapat bahwa lembaga sosial pada hakikatnya adalah kumpulan-kumpulan norma sosial yang telah diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat. Yang berarti bahwa, lembaga sosial merupakan suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau kegiatan masyarakat yang dianggap penting dan formal karena terikat dengan norma-norma dan peraturan yang ada di dalamnya. Leopod von Wiese dan Howard Becker yang dikutip dalam Soekanto (2012: 173) memandang dari sudut pandang fungsinya, lembaga sosial diartikan sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan manusia dan kelompoknya dengan tujuan untuk memelihara hubungan tersebut sesuai dengan kepentingan bersama dalam suatu masyarakat.

Summer dalam Soekanto (2012: 174) memandang dari sudut kebudayaan, mengartikan lembaga sosial sebagai sebuah cita-cita, sikap, dan perlengkapan kebudayaan yang bersifat kekal serta memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa lembaga sosial merupakan seperangkat sistem norma, nilai, status, peran, serta sekelompok orang yang bertahan lama dengan suatu prinsip untuk mengatur perilaku dan memenuhi tujuan tertentu.

Lembaga sosial juga memastikan kelangsungan aspek-aspek kehidupan sosial yang ada didalam masyarakat secara menyeluruh. Menurut Soekanto (1982: 230) suatu lembaga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- a. Memberikan pedoman kepada masyarakat, tentang bagaimana seharusnya bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah. Hal ini tentunya berkaitan dengan benturan antar kepentingan individu maupun kelompok yang tidak diinginkan untuk terjadi.



- b. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. Artinya selain memberikan pedoman, lembaga sosial harus dapat menjaga kestabilan sosial agar tidak terjadi disintegrasi didalam suatu masyarakat.
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Dengan demikian, lembaga sosial juga berfungsi sebagai alat pengendali atas berbagai bentuk penyimpangan sosial (Soekanto, 1982: 230-231).

Terbentuknya lembaga sosial berawal dari tumbuhnya suatu hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat. Hubungan tersebut sangat berkaitan erat dengan berlakunya norma sebagai patokan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti kebutuhan akan keindahan, keadilan, pendidikan, ketentraman, keamanan, dan kenyamanan bagi keluarga. Sehingga melalui kebutuhan-kebutuhan tersebut terbentuklah suatu lembaga yang memiliki tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya kebutuhan akan pendidikan, maka berdirilah sebuah lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Abdulsyani, 2015 : 76).

Proses terbentuknya suatu lembaga sebenarnya tidak berhenti demikian saja, namun dapat berlangsung lebih jauh lagi, hingga suatu norma yang ada didalam masyarakat tidak hanya menjadi *institutionalized* dalam masyarakat, tetapi menjadi *internalized* (Wulansari, 2009: 80). Artinya, masyarakat berada pada perkembangan dimana dengan sendirinya ingin berperilaku sejalan dengan norma yang berlaku dimasyarakat. Menurut Gillin dan Gillin yang dikutip dalam Setiadi (2011: 293) menguraikan tentang beberapa ciri umum lembaga sosial, yaitu :

- a. Lembaga sosial adalah organisasi dari pola pikir dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga sosial itu sendiri terdiri adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur kebudayaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
- b. Lembaga sosial memiliki tingkat kekekalan tertentu yang merupakan salah satu ciri dari semua lembaga. Artinya suatu lembaga sosial dapat berjalan

relatif lama karena adanya sistem kepercayaan dan tindakan yang bermakna didalamnya.

- c. Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Tujuan dalam hal ini berbeda dengan fungsi, umumnya tujuan suatu lembaga adalah sesuatu yang harus dicapai oleh golongan masyarakat tertentu. Sedangkan fungsi merupakan peran lembaga dalam sistem sosial dan kebudayaan masyarakat. Sehingga fungsi tersebut dapat terlihat ketika suatu lembaga melakukan sesuatu yang berarti.
- d. Lembaga sosial memiliki alat-alat penunjang yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga itu sendiri, seperti bangunan, peralatan, dan lain sebagainya.
- e. Lembaga sosial biasanya memiliki lambang yang secara simbolis menggambarkan tentang tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan.
- f. Lembaga sosial memiliki tradisi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat merumuskan tujuannya. Misal tata tertib yang berlaku sebagai dasar dari lembaga tersebut dalam menjalankan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada dasarnya masyarakat merupakan kumpulan dari lembaga, baik lembaga informal yang muncul sendiri di dalam masyarakat, maupun lembaga formal yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pembentukan lembaga sosial membutuhkan proses yang cukup panjang, karena bukan hanya terorganisir saja tetapi sudah menyangkut perilaku individu dan kelompok yang didasarkan pada seperangkat aturan dan norma. Dalam mendirikan sebuah lembaga sosial ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Pemahaman kondisi masyarakat, merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam pembentukan sebuah lembaga. Oleh karena itu, pemahaman akan kondisi masyarakat perlu dilakukan sejak awal pembentukan lembaga sosial.

- b. Penerapan prinsip demokratis dalam pembentukan lembaga perlu dilakukan untuk memberikan hak kepada masyarakat dalam menentukan posisi di suatu lembaga sosial.
- c. Penanganan perbedaan persepsi yang terjadi di masyarakat, konflik memang tidak dapat di hindari di lingkungan masyarakat hal tersebut tentu menghambat berdirinya suatu lembaga sosial. Oleh karena itu, penyelesaian atas perbedaan persepsi perlu dilakukan agar memiliki tujuan yang sama dalam pembentukan lembaga sosial (Budhi, 2009: 32).

Lembaga sosial secara menyeluruh memiliki fungsi yang berbeda di setiap aspek kehidupannya. Dalam tulisannya mengenai *Comparative Social Institutions*, Okunade (2016: 12) menyatakan beberapa fungsi lembaga sosial sebagai berikut.

- a. Fungsi Ekonomi

Dengan adanya lembaga sosial kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi karena lembaga sosial ada yang menyediakan sistem produksi, distribusi, maupun layanan pemenuh kebutuhan.

- b. Fungsi Politik

Adanya lembaga sosial membantu masyarakat untuk memperdalam karakter individu dalam suatu organisasi dan juga untuk mempertahankan berlangsungnya lembaga itu sendiri.

- c. Fungsi Kekeluargaan

Salah satu tanggung jawab sebuah lembaga adalah meningkatkan kualiatas manusia sehingga secara kekeluargaan dapat memperbaiki dan membesarkan generasi baru dalam masyarakat melalui sebuah pernikahan.

- d. Fungsi Sosial

Adanya lembaga sosial dapat menjaga kestabilan sosial dengan cara memberikan contoh karakter yang baik dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

- e. Transformasi Sosial

Lembaga sosial melindungi warisan sosial dengan mentransformasikannya dari satu generasi ke generasi berikutnya.



Indonesia memiliki banyak jenis-jenis lembaga sosial yang menaungi beberapa aspek kehidupan manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Secara garis besar, jenis-jenis lembaga tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga sosial formal (resmi) maupun lembaga sosial tidak resmi (informal) (Narwoko, 2013; 266). Berikut adalah lembaga sosial yang memiliki peran dalam mengendalikan kehidupan sosial masyarakat diantaranya :

a. Lembaga Sosial Formal

1) Lembaga Kepolisian

Lembaga Kepolisian merupakan lembaga keamanan dalam negeri yang dibentuk oleh pemerintah secara resmi. Lembaga ini sering disebut sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk mengamankan kehidupan masyarakat dari berbagai gangguan kriminal, seperti pencurian, penodongan, perampokan, pembunuhan, penganiayaan, dan berbagai penyimpangan sosial lainnya yang berkaitan dengan tindak kriminal. Namun sangat disayangkan, di Indonesia sendiri jumlah aparat kepolisian yang menangani pelanggaran norma sosial masih sangat terbatas dan jauh dari kata memadai, karena memang anggaran terbatas untuk memenuhi standar kebutuhan (Danendra, 2012: 41).

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengemban tugas kepolisian. Untuk itu, dibentuklah sebuah lembaga keamanan yang biasa disebut dengan Satuan Pengamanan Masyarakat (satpam). Lembaga tersebut berada dibawah naungan lembaga kepolisian. Tugas lembaga kepolisian itu sendiri adalah untuk memberikan pelatihan-pelatihan dasar sesuai dengan standar petugas keamanan yang ada (Danendra, 2012: 42).

2) Lembaga Pendidikan

Pemerintah mendirikan lembaga pendidikan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak bangsa. Lembaga

ini dipimpin oleh seorang menteri dan dibantu oleh staf-staf lainnya. didalam lembaga ini dilengkapi dengan perangkat pendidikan seperti kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan administrasi pendidikan. Peran lembaga pendidikan ini lebih bersifat preventif, karena lembaga ini tidak diberikan wewenang untuk menghukum pelanggar atau perilaku menyimpang terhadap norma sosial yang berlaku. Hanya saja, lembaga ini bertugas untuk membimbing peserta didik agar dapat menjalankan norma sosial dengan baik. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas dalam intelektual saja, melainkan juga lulusan yang siap menjadi generasi yang memiliki bekal sosial yang matang (Hasbullah, 2005: 135).

### 3) Lembaga Ekonomi

Lembaga Ekonomi merupakan sarana yang digunakan untuk memelihara kestabilan ekonomi yang ada, lembaga ini berperan dalam mengatur proses produksi dan distribusi barang maupun jasa yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Secara umum, lembaga ekonomi berfungsi untuk mengatur hubungan antara pelaku ekonomi dan meningkatkan produktivitas ekonomi semaksimal mungkin. Sehingga dapat tercapai kestabilan ekonomi sesuai dengan apa yang diinginkan (Sora N, 2015)

## b. Lembaga Sosial Informal

### 1) Lembaga Adat

Adat istiadat merupakan sebuah pola kehidupan yang dilakukan secara beruang, sehingga frekuensi yang terus menerus, bahkan turun temurun ini menjadi sebuah kebiasaan yang harus dipertahankan. Dengan demikian, perlu adanya pembentukan hukum adat agar proses pembiasaan akan pola kehidupan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, lembaga adat merupakan sebuah lembaga sosial yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan berlakunya adat istiadat dalam suatu masyarakat tertentu. Biasanya dalam lembaga ini terdapat seseorang yang dipercayai mengetahui semua tentang adat

istiadat yang berlaku, dan dijadikan sebagai seorang yang dapat dimintai nasihat tentang hal-hal yang bersifat keramat atau magis religious. Misalnya, tentang hari-hari baik untuk mendirikan suatu rumah, melangsungkan hari pernikahan, mengobati orang sakit dan lain sebagainya. Tokoh ini lah yang berperan dalam lembaga adat, biasanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, mereka mengadakan musyawarah bersama untuk mendapatkan suatu solusi. Lembaga adat bertugas untuk membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat yang ada (D. Natalia, 2019: 18)

## 2) Lembaga Keagamaan

Merupakan salah satu lembaga penting dalam mengatur kehidupan manusia yang berfungsi untuk mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan. Lembaga ini berbeda dengan lembaga adat, karena pada dasarnya adat istiadat berasal dari kebiasaan suatu masyarakat tertentu yang perlu dipertahankan dan dijaga keberadaannya. Sedangkan agama sendiri merupakan sesuatu yang bersifat universal dan mendasar sebagai pedoman hidup bagi manusia. Jika norma-norma lembaga adat bersumber pada kebiasaan hidup manusia dalam berkelompok, maka sumber daripada lembaga agama berasal dari Tuhan yang ditulis dalam kitab suci tertentu, misalnya Injil yang merupakan sumber norma bagi umat Kristiani, Al-Qur'an merupakan sumber norma bagi umat Islam, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh agama lebih menekankan pada penuntutan umat beragama agar berperilaku sesuai dengan tuntutan agamanya masing-masing. Misalnya, untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama lembaga agama berhak melarang umatnya untuk tidak mencuri, berzinah, membunuh sesama, menghina, dan lain sebagainya (Gunawan, 2017: 7).

### 3) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga ini juga turut andil dalam mengendalikan kehidupan sosial. Belakangan ini banyak LSM bermunculan seiring dengan pelembagan demokrasi di Indonesia dengan tujuan untuk menuntut akan adanya penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bersih dan baik yang tentunya sangat dibutuhkan oleh berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian, kemunculan berbagai LSM merupakan salah satu kiat masyarakat untuk dapat mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, meskipun terkadang ada sejumlah LSM yang justru menjadi pemerias lembaga sosial lainnya (Herdiansyah, 2016: 56)

Melalui lembaga sosial, dapat ditemukan seperangkat aturan yang menjadi pedoman bagi kehidupan kelompok dan seperangkat aturan tersebut memiliki kekuatan untuk mengikat para anggotanya agar dapat berperilaku sejalan dengan tata yang berlaku. Dari hal tersebut, memunculkan beberapa norma yang dijadikan sebagai petunjuk bagi masyarakat umum. Misal norma agama mengarahkan agar masyarakat beriman dan berperilaku sesuai dengan petunjuk Tuhan, norma kesopanan memberikan arah agar memiliki sikap sopan terhadap siapapun, dan lain sebagainya.

### 3. Revolusi Sosial

Revolusi merupakan kata yang memiliki makna historis yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Revolusi merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris yaitu *revolution*. Menurut KBBI revolusi memiliki arti “sebuah perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata)”. Sehingga dapat diimplikasikan bahwa revolusi merupakan sebuah proses perubahan sosial yang dilakukan secara radikal dan fundamental dalam kehidupan masyarakat. Dalam sebuah revolusi, membutuhkan perjuangan fisik dan pemberontakan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

Menurut Sartono Kartodirjo, revolusi merupakan sebuah proses politik yang penuh dengan konflik dan pemberontakan terhadap tatanan pemerintahan yang ada. Masa Revolusi ini merupakan salah satu rentangan sejarah bagi bangsa Indonesia yang memiliki peran dalam pembentukan negara Indonesia (Kartodirjo, 1993: 71). Berawal dari kekejaman kolonialisme dan imperialisme pemerintah Asing, Revolusi nasional muncul sebagai wujud kebangkitan dalam diri masyarakat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan seutuhnya. Keinginan tersebut diwujudkan ketika melihat adanya kesempatan saat Jepang telah menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 atas terjadinya Perang Dunia II yang melibatkan kedua belah pihak. Persiapan-persiapan Kemerdekaan dilakukan di Indonesia dengan waktu yang singkat dan pertimbangan yang cukup besar. Hingga pada akhirnya kemerdekaan Indonesia diperoleh pada tanggal 17 Agustus 1945 ditandai dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan yang disampaikan oleh Soekarno-Hatta (Poesponegoro, 1993: 87).

Revolusi di Indonesia terjadi dalam rentang waktu tahun 1945-1949 yaitu pasca proklamasi kemerdekaan. Revolusi yang merupakan hasil dari kemerdekaan bukan hanya sebuah episode yang paling *crucial* dalam sejarah Indonesia tetapi juga salah satu elemen yang memberikan dampak signifikan terhadap persepsi Indonesia sebagai sebuah negara (Ricklefs, 2001: 261). Revolusi dalam hal ini bukan merupakan sebuah progress dimana semua pihak dan kelas bersatu, akan tetapi elemen masyarakat terpecah belah oleh ideologi yang dipercaya masing-masing individu atau kelompok pejuang. Masa ini merupakan masa pertamakali untuk masyarakat Indonesia, dimana kepemimpinan bangsa asing secara tiba-tiba terangkat. Hasil dari hilangnya kepemimpinan bangsa asing tidak serta merta dapat mentransformasi Indonesia menjadi sebuah negara yang aman dan damai, akan tetapi menimbulkan pergolakan-pergolakan antar individu atau kelompok tertentu yang memegang teguh ideologinya sendiri. Hal ini terjadi karena sebagian dari pemimpin revolusi mengenyam pendidikan yang berbeda (Taylor, 2013: 124).

*commit to user*



Abad ke-19 adalah periode pergolakan atau revolusi sosial yang menyertai terjadinya perubahan sosial sebagai akibat dari pengaruh kuat kolonialisme Barat. Tergusurnya keseimbangan masyarakat tradisional menimbulkan rasa frustrasi dan tersingkir yang umum, dan jika perasaan-perasaan itu dikomunikasikan maka akan berkembang menjadi keresahan dan kegelisahan yang meluas. Keadaan seperti itu bisa meledak jika difokuskan di bawah satu pemimpin yang mampu mengarahkan potensi agresif itu pada sasaran-sasaran tertentu yang dianggap bermusuhan atau menuju perwujudan gagasan-gagasaan tentang milenari (Kartodirdjo, 1984: 15).

Dalam teori revolusi, Karl Marx mengatakan bahwa perkembangan masyarakat di tingkat kekuatan produksi material masyarakat berada dalam pertentangan dengan keberadaan hubungan produksi di tempat mereka bekerja. Bentuk perkembangan kekuatan produksi itu lantas berubah menjadi pengekangan (penindasan). Konflik antara kekuatan produksi baru dengan hubungan produksi lama itulah yang menjadi gerakan revolusi (Kartodirdjo, 1984: 161). Marx mengasumsikan bahwa kapitalisme akan memunculkan kesejahteraan dan penderitaan. Kesejahteraan dalam kelas borjuis semakin mengecil dan penderitaan dalam kelas buruh kian membesar. Ketegangan antara borjuis dan proletariat akan mendorong kaum proletariat untuk bersatu dan sadar-kelas. Ketegangan tersebut lantas mengarah pada revolusi yang disebut “revolusi sosial” (Kartodirdjo, 1984: 163).

Gagasan-gagasan revolusi muncul sebagai akibat dari gagalnya kaum reformis dalam menata bangsa dan negaranya. Umumnya, revolusi ditandai dengan adanya penggulingan kekuasaan dan konflik kekerasan yang ditimbulkan antara dua kekuatan yang bertahan dan berusaha saling menjatuhkan. Perubahan radikal dalam suatu sistem sosial suatu masyarakat berlangsung dalam tempo yang singkat dengan jalan kekerasan. Perubahan yang dilakukan dengan jalan kekerasan tersebut mengesampingkan azas-azas lama kemudian digantikan dengan azas-azas baru. Perubahan yang terjadi dengan waktu yang singkat dan melibatkan kekerasan itu tidak lebih

dan tidak kurang adalah suatu perubahan yang bersifat baik dan mengarah pada kemajuan atau perkembangan (Brinton, 1962: 13).

Definisi ilmu sosial kontemporer mengenai revolusi menekankan pada perubahan “negara” dan “struktur kelas” dengan kekerasan. Menurut Samuel P. Huntington yang dikutip dalam Forlan (2004: 34) revolusi adalah perubahan domestik yang keras, mendasar, dan cepat dalam nilai-nilai dan mitos-mitos dominan masyarakat mengenai lembaga-lembaga politiknya, struktur sosialnya, kepemimpinannya, kegiatan dan kebijakan pemerintahannya. Anthony Gidens mendefinisikan revolusi merupakan perebutan kekuasaan negara melalui cara-cara kekerasan oleh para pemimpin gerakan massa, kemudian kekuasaan tersebut digunakan untuk memprakarsai proses reformasi sosial secara besar-besaran (Forlan, 2004: 34-35).

Bangsa Indonesia mengalami perubahan sosial yang begitu besar dan cepat dalam kurun waktu tahun 1945-1949. Ditinjau dari aspek historis, terjadinya perubahan sosial adalah suatu proses yang akan berlangsung terus sepanjang kehidupan manusia. Sementara ditinjau dari aspek bentuknya, terjadinya perubahan sosial itu akan meliputi:

- a. Perubahan Sosial yang berlangsung secara lambat (evolusi) dan Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat (revolusi).
- b. Perubahan Sosial yang berlangsung dengan skala kecil dan Perubahan sosial yang berlangsung dengan skala besar.
- c. Perubahan Sosial yang berlangsung karena dikehendaki atau direncanakan dan Perubahan sosial yang berlangsung karena tidak dikehendaki atau tidak direncanakan (Satanka, 2004: 160).

Proses terjadinya perubahan sosial dapat berlangsung secara lambat dan dapat pula berlangsung secara cepat. Jika perubahan sosial itu berlangsung secara lambat dan memerlukan waktu yang lama, di dalamnya juga terdapat serentetan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat, maka perubahan semacam itu dinamakan evolusi. Perubahan secara evolusi biasanya terjadi dengan sendirinya, tanpa suatu rencana ataupun suatu kehendak tertentu. Perubahan-perubahan semacam ini

berlangsung karena adanya upaya-upaya masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Sedangkan perubahan sosial yang bersifat radikal dengan waktu yang singkat disebut dengan revolusi. Suatu revolusi berlangsung dengan didahului oleh suatu pemberontakan (*rebellion*) yang kemudian menjelma menjadi revolusi (Satanka, 2004: 161).

Perubahan sosial dapat berlangsung karena dikehendaki atau direncanakan (*intended change*), dan dapat pula tidak dikehendaki atau tanpa suatu perencanaan (*unintended change*). Perubahan sosial yang telah direncanakan ke arah suatu tujuan yang hendak dicapai, namun perubahan yang terjadi tidak selamanya berhasil seperti yang dikehendaki. Oleh karena itu, keberhasilan suatu perubahan sosial yang direncanakan akan banyak bergantung kepada kemampuan rekayasa sosial yang dilakukan oleh para perencana sosialnya. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan (telah direncanakan) terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan biasanya menyebut para perencana sosial, yakni seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan (Santaka, 2004: 162).

Dalam konteks perubahan yang dikehendaki maka pada perencana sosial inilah yang akan memimpin mengadakan perubahan dan menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Perubahan sosial yang dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan dari perencanaan sosial tersebut. Dalam ilmu sosiologi, cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dijelaskan di atas, dinamakan *social planning* (perencanaan sosial) atau sering dinamakan pula dengan istilah *social engineering* (perekayasa sosial) (Salam, 2002: 266).

Bentuk perubahan yang tidak dikehendaki (meskipun telah diperhitungkan sebelumnya oleh para pelopor perubahan), merupakan akibat dari perubahan-perubahan yang dikehendaki, misalnya saja hilangnya wewenang para petugas pamong praja di dalam pemerintahan desa, bertambah pentingnya peranan dukuh yang menyebabkan berkurangnya ikatan antara kekuatan sosial yang merupakan masyarakat desa, serta secara berangsur-angsur, hilangnya peranan kaum bangsawan sebagai warga kelas sosial yang tinggi dalam masyarakat. Suatu perubahan yang dikehendaki dapat timbul sebagai suatu reaksi (yang direncanakan) pada perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi sebelumnya, baik yang merupakan perubahan yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Dalam hal ini, perubahan-perubahan yang dikehendaki, maka perubahan-perubahan yang kemudian muncul merupakan perkembangan lebih lanjut dari proses perubahan sebelumnya (Salam, 2002: 267).

Proses revolusi sosial dan peran para partisipasinya sangat beragam. Perpecahan yang terjadi secara bertahap antara kelompok moderat dan kelompok oposisi menunjukkan bahwa, perang saudara terjadi karena para pemimpin partai-partai revolusioner berusaha memperluas kekuasaan mereka ke seluruh negara dan menghilangkan oposisi sehingga munculkan kekuasaan otoriter oleh seorang pemimpin tunggal. Akibat dari revolusi bisa sangat beragam, tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan revolusi dan proses berlangsungnya revolusi (Notosusanto, 1972: 70). Menurut Liford Edward yang dikutip dalam Ricklefs (2005: 430) suatu revolusi dapat dianggap berakhir jika telah tercapai suatu persetujuan kerja (working agreement) antara pelbagai pihak yang terlibat di dalam revolusi tersebut. Adanya persetujuan itu akan menghasilkan keseimbangan baru karena prinsip-prinsip utama yang telah ditegaskan oleh revolusi tidak lagi menjadi bahan sengketa.

## B. Penelitian Yang Relevan

1. Hasil penelitian Dewi Kusumaningtyas (2011) yang berjudul “Gyo Tai, Prajurit Mangkunegaran Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa pendudukan Jepang, selain Legiun Mangkunegaran ada Prajurit lain bernama Gyo Tai yang khusus bertugas menjaga Praja Mangkunegaran. Selama pendudukan Jepang khususnya di wilayah Mangkunegaran, semua kejadian dan keadaan yang terjadi di Praja Mangkunegaran akan dilaporkan oleh prajurit tersebut kepada kepala Praja Mangkunegaran. Melihat pembahasan yang sama mengenai penjagaan terhadap Praja Mangkunegaran, penelitian ini memberi sedikit gambaran terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai Rumeksopuro sebagai lembaga keamanan Mangkunegaran. Dalam penelitian selanjutnya akan membahas tentang bagaimana sistem keamanan Mangkunegaran pada tahun 1945-1949 tepatnya pasca Kemerdekaan Indonesia yang merupakan masa transisi Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anita Dhian Pratiwi (2015) yang berjudul “Legiun Mangkunegaran Tahun 1916-1942 dan Implementasinya dalam Pembelajaran Sejarah”. Legiun Mangkunegaran memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia, banyak peperangan yang telah diikuti untuk memperoleh keadilan. Mengingat Legiun Mangkunegaran sebagai Korps bersenjata yang banyak mengadopsi latihan militer ala Barat, maka dapat diimplementasikan dalam pembelajaran sejarah yang berkaitan dengan kompetensi dasar pengaruh kolonialisme dan imperialism Barat. Legiun Mangkunegaran tersebut kemudian dibubarkan oleh Jepang karena dianggap sebagai ancaman, untuk itu dalam penelitian selanjutnya penulis akan mengkaji tentang sistem keamanan Mangkunegaran pasca kemerdekaan. Adanya penelitian ini, dapat mempermudah penulis dalam mengkaji sejarah berdirinya Rumeksopuro di Mangkunegaran.
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fika Handayani (2013) yang berjudul “Prajurit Wanita Jawa Dalam Istana Mangkunegara I Surakarta”. Penelitian



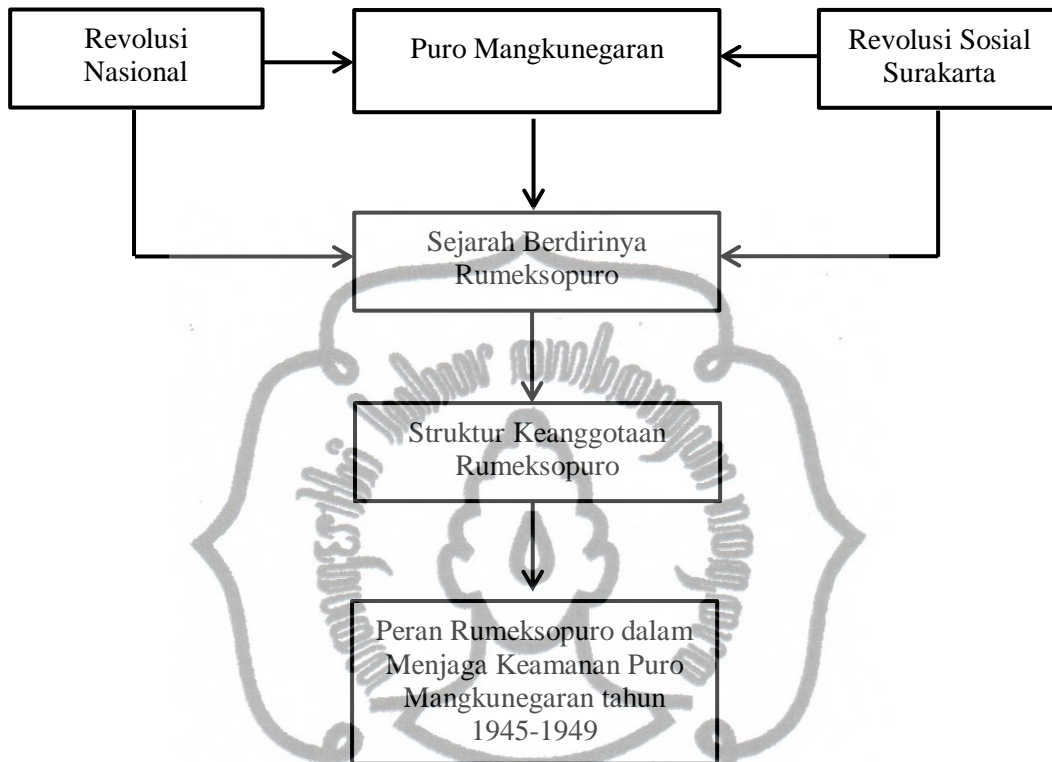
ini menunjukkan keberadaan prajurit wanita yang ada di Mangkunegaran, tugasnya untuk mengawal Raja Mangkunegaran ketika bertemu dengan masyarakat umum. Selain itu juga melayani kebutuhan pribadi Raja seperti membawakan air minum, kipas, payung dan lain sebagainya. Hal tersebut menambah wawasan bagi peneliti bahwa di Mangkunegaran memiliki beberapa prajurit yang memiliki tugasnya masing-masing. Penelitian selanjutnya akan mengkaji tentang peran Rumeksopuro tahun 1945-1949 di Mangkunegaran. Sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengkaji tentang bagaimana peran Rumeksopuro sebagai lembaga keamanan di Mangkunegaran.

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi Setyowati (2019) yang berjudul “Kesejahteraan Pegawai Mangkunegaran Pada Masa Mangkunegara VII (1916-1944)”. Dalam penelitian ini banyak memuat tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Mangkunegara VII untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Mangkunegaran. Kesejahteraan tersebut tentunya juga berpengaruh dalam kinerja mereka untuk melaksanakan tugasnya. Penelitian ini memberi wawasan bagi peneliti terutama berkaitan dengan kesejahteraan pegawai. Untuk itu dalam penelitian mengenai Rumeksopuro sebagai lembaga keamanan Mangkunegaran pada masa Mangkunegaran VIII akan dikaji juga mengenai kesejahteraan anggota lembaga tersebut. Sehingga dapat mengetahui bagaimana perbedaan kesejahteraan pegawai pada masa pemerintahan Mangkunegara VII dan Mangkunegara VIII.
5. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Laela Faiqoh (2007) yang berjudul “Rumeksopuro Lembaga Penjaga Keamanan Mangkunegaran di Era Transisi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949”. Penelitian ini menunjukkan adanya sebuah lembaga penjaga keamanan yang bernama Rumeksopuro di Mangkunegaran. Lembaga tersebut bertujuan untuk menjaga kestabilan istana Mangkunegaran pada masa transisi kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949. Penelitian ini banyak menambah wawasan bagi peneliti tentang adanya lembaga keamanan Rumeksopuro. Sehingga penelitian ini dapat menjadi

acuan dalam mengkaji secara historis bagaimana peran Rumeksopuro sebagai lembaga keamanan di Mangkunegaran tahun 1945-1949.

6. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ebipamowei Okoyen (2019) yang berjudul “Interrogating Security Agencies: The Role of the Police Force in the 2015 General Election in Bayelsa State, Nigeria”. Penelitian ini mengkaji tentang peran lembaga keamanan *Nigerian Police Force* (NPF) dalam memberikan keamanan saat berlangsungnya pemilihan umum tahun 2015 di Bayelsa, Nigeria. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga keamanan, *Nigerian Police Force* (NPF) dilatih dan dibekali pengetahuan untuk mengelola situasi yang tidak aman. Penelitian ini banyak menambah wawasan peneliti yang berkaitan dengan peran sebuah lembaga keamanan dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan suasana damai. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mengkaji tentang bagaimana semestinya peran sebuah lembaga keamanan. Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji tentang bagaimana peran Rumeksopuro sebagai lembaga keamanan Mangkunegaran dalam menciptakan suasana damai pada masa transisi kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949.
7. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Temitope Francis Abiodun (2019) yang berjudul “Security Intelligence Cooperation And The Coordinated War On Terror Among Nigeria’s Security Agencies: Panacea To Stable National Security”. Penelitian ini menunjukan tentang kerjasama yang baik dari berbagai lembaga keamanan dalam menghadapi teror dan perang yang ada di Nigeria. Sebagai negara yang rawan akan konflik, Nigeria membutuhkan suatu kekuatan yang utuh dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Oleh karena itu kerjasama antar lembaga keamanan merupakan cara penting untuk memastikan sebuah perdamaian dan keamanan nasional yang stabil. Penelitian ini dapat membantu peneliti dalam mengkaji tentang bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh lembaga keamanan Rumeksopuro dalam menghadapi perang kemerdekaan di Surakarta tahun 1949.

### C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir

#### Keterangan :

Puro Mangkunegaran berdiri sebagai akibat dari adanya Perjanjian Salatiga tanggal 17 Maret 1757. Perjanjian Salatiga merupakan perjanjian antara Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Pangeran Mangkunegaran. Isi Perjanjian Salatiga adalah pembagian wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta yang diberikan kepada Pangeran Mangkunegaran. Sebagai kerajaan yang bermula dari pasukan gerilya dalam memperoleh keadilan, Mangkunegaran memiliki tradisi militer yang baik. Bersamaan dengan berdirinya Mangkunegaran, dibentuk sebuah satuan militer yang bernama Legiun Mangkunegaran. Legiun

Mangkunegaran ini berkembang dengan baik karena mendapat bantuan subsidi dan latihan militer dari pemerintah Belanda.

Legiun Mangkunegaran mengalami penurunan pada masa pendudukan Jepang. Penurunan satuan militer Mangkunegaran terjadi karena Jepang melarang segala bentuk organisasi yang telah diciptakan oleh Belanda, termasuk Legiun Mangkunegaran. Legiun Mangkunegaran dibubarkan dan anggotanya berubah menjadi abdi dalem yang bernama *Worontono*. Adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menandakan bahwa masa pemerintahan Jepang telah berakhir. Pada tanggal 18 Agustus 1945, pihak Kasunanan dan pihak Mangkunegaran langsung menyampaikan kesiapannya untuk berdiri dibelakang pemerintah Republik Indonesia. Menanggapi sikap keduanya, Soekarno selaku presiden Indonesia mengeluarkan sebuah Piagam Kedudukan yang menyatakan bahwa Surakarta merupakan Daerah istimewa yang memiliki hak otonom untuk mengatur sistem pemerintahannya sendiri dibawah pemerintah Republik Indonesia.

Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah yaitu masa revolusi (1945-1949). Masa revolusi ditandai dengan kedatangan pasukan sekutu yang ternyata diboncengi oleh Belanda agar dapat menegakkan kembali Hindia-Belanda. Perlawanan-perlawanan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan terjadi diberbagai daerah yang ada di Indonesia termasuk Surakarta. Dalam kurun waktu yang bersamaan, di Surakarta terjadi pergolakan sosial yang menentang adanya kebijakan Piagam Kedudukan. Piagam Kedudukan dianggap memperkuat sistem pemerintahan tradisional yang mengekang kebebasan rakyat. Pergolakan sosial yang terjadi di Surakarta disebut dengan Gerakan Anti Swapraja. Gerakan anti Swapraja menjaral menjadi sebuah Revolusi Sosial yang melibatkan penculikan kerabat keraton dan merubah sistem pemerintahan di Surakarta. Menanggapi kejadian tersebut, pemerintah Mangkunegaran sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga keamanan. Perubahan terjadi pada abdi dalem *Worontono* menjadi laskar pura yang bernama *Rumeksopuro* yang bertugas menjaga keamanan Puro Mangkunegaran dari pergolakan sosial yang terjadi pada masa revolusi.